

**PERAN UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN (UNMISS)
DALAM MENANGANI KRISIS HEWAN TERNAK DI SUDAN SELATAN**

Oleh: Kachfi Ash Shidqi

Email: kachfi.ash1794@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Bibliografi

Bibliografi: 13 Buku, 14 Jurnal, 4 Dokumen Resmi, 28 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyzes the role of United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) in solving cattle crisis in South Sudan. Cattles are known to have exceptionally high value both figuratively and literally in South Sudan, and the crisis that was caused mainly by Cattle Raiding and the escalation of civil conflict has made an extremely massive amount of casualties to this country and its people. The civil war, involving the government and the opposition, have caused the inclusion of a large amount of weaponry to the country which in turn made the conflict and situation deadlier than ever. With this situation, the United Nations (UN) efforts in founding UNMISS is a topic that needs to be researched to understand the mechanism, support both domestically and internationally, and its result in solving the crisis that was happening.

This qualitative research analyzes the problem using the internasional organization theory of Clive Archer. Datas that are relevant are taken from documents, internationa and local journal, books, official reports, newspaper, etc.

The result shows that UNMISS has succeeded in doing its role as an actor in solving the ongoing crisis. These efforts that was done by UNMISS include security mandate, the ratification of Marial Bai Agreement, which also include collaboration with local government and people, which ultimately is a big part of implementing reconciliation of conflicts between ethnic groups. It can be seen from the result that Cattle Raidings and crisis has steadily dropped compared to when the civil war started with all kinds of community with the government being united to obey UNMISS policies and the organization's effort which mostly succeeded in controlling armed conflicts in the country.

Keywords: UNMISS, Cattle Raiding, Cattle, South Sudan

PENDAHULUAN

Hewan ternak di Sudan Selatan merupakan sebuah komoditas yang sangat tinggi kedudukannya bagi masyarakat di negara tersebut. Hewan-hewan ternak ini, yang sangat dipentingkan kedudukannya justru juga menjadi salah satu subjek inti yang sangat signifikan dalam berlangsungnya krisis di Sudan Selatan, dengan perampasan atas kepemilikan hewan ternak yang sangat marak terjadi menyebabkan terjadinya krisis hewan ternak yang semakin didorong dengan berlangsungnya konflik perang sipil di Sudan Selatan.

Dibalik fenomena ini peran organisasi yang dikenal sebagai *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS) yang berperan sebagai potensi dalam menyelesaikan permasalahan krisis ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. UNMISS sebagai suatu organisasi merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan yang berlokasi di Sudan Selatan. Menjadi bagian dari organisasi PBB dengan jumlah anggota sebanyak 17.000 personil, UNMISS telah sejak lama memberikan berbagai macam bentuk bantuan di Sudan Selatan dalam bentuk pengamanan serta bantuan kemanusiaan lainnya.¹

Dalam studi hubungan internasional, peran aktor disini menjadi penentu dalam penanganan krisis yang dibahas dan krisis hewan ternak inilah yang berkaitan dengan persoalan isu kontemporer yang dibahas dalam bidang hubungan internasional tersebut. Periode waktu yang akan diambil dalam penelitian

ini akan dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Periode tersebut menjadi periode yang peneliti tentukan dalam pengkajian fenomena masalah dikarenakan tahun tersebut merupakan periode yang menggambarkan situasi terkini dari berlangsungnya permasalahan *Cattle Raiding* di Sudan Selatan. Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika dan memiliki batasan wilayah dengan beberapa negara lain seperti Kongo, Sudan, Uganda, dan lain sebagainya. Dengan populasi yang mencapai jumlah sekitar 10 juta jiwa negara Sudan Selatan ini memiliki ibukota yang dikenal dengan nama kota Juba sebagai kota terbesar di negara ini.²

Di wilayah negara ini sektor pertanian dan hewan ternaknya merupakan salah satu sumber pangan dan mata pencaharian terutama di wilayah pedesaan. Tidak hanya itu, sebagian besar perekonomian di Sudan Selatan juga diisi dengan adanya produk-produk pangan yang dihasilkan dari hewan ternak tersebut seperti susu dan kebutuhan lainnya.³ penghasilan makanan dan kebutuhan gizi masyarakat di Sudan Selatan sendiri juga rata-rata bersifat musiman, sehingga faktor ini menyebabkan kebutuhan produk susu menjadi salah satu sumber pangan yang sangat dipentingkan di beberapa musim tertentu di sana.

Situasi yang demikianlah yang memberikan dorongan yang besar terhadap terjadinya apa yang

¹ UNMISS, Facts and Figures, <https://unmiss.unmissions.org/facts-and-figures>, diakses pada 27 September 2022.

² Britannica, South Sudan|Facts, Map, People, and History, <https://www.britannica.com/place/South-Sudan>, diakses pada 3 Maret 2022.

³ Calley, Andy, 2018. Livestock and Livelihoods in South Sudan, K4D: Knowledge, Evidence and Learning for Development, hal. 3

dikenal sebagai *Cattle Raiding* di Sudan Selatan. Selama beberapa tahun belakang ini, *Cattle Raiding* merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang sangat sering terjadi yang menyebabkan berkembangnya aksi ini menjadi aksi kriminalitas yang semakin lama semakin berbahaya seiring waktu. Sumber permasalahan yang ditimbulkan pada *Cattle Raiding* di Sudan Selatan ini memang sejak lama dikenal sangat rumit untuk dipecahkan dan tidak terlihat adanya pengurangan dari tahun ke tahun.

Berbagai upaya perjanjian dan traktat telah diupayakan oleh pihak pemerintah dan beberapa organisasi tertentu yang bahkan melibatkan *African Union* dan PBB secara langsung. Memang tidak dapat diragukan lagi bahwa sangat diperlukan adanya intervensi dan bantuan dari pihak yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk melakukan resolusi terhadap permasalahan ini demi mencapai situasi damai antara pihak-pihak yang terlibat.

United Nations Mission in South Sudan atau yang secara singkat dikenal sebagai UNMISS adalah salah satu bagian dari misi PBB yang memfokuskan ruang lingkup tugasnya secara spesifik di Sudan Selatan.⁴ sejak awal dibentuknya misi organisasi ini, UNMISS telah melakukan berbagai macam bentuk kerja sama dengan pemerintah Sudan Selatan baik secara lokal maupun nasional dengan tujuan bersama untuk mengurangi terjadinya konflik *Cattle Raiding* serta krisis kekurangan hewan ternak di berbagai wilayah Sudan Selatan.

⁴ United Nations, United Nations Mission in South Sudan, <https://unmiss.unmissions.org/>, diakses pada 5 Maret 2022.

Berbagai macam advokasi dan perjuangan telah diserukan oleh rakyat Sudan Selatan, dan UNMISS sebagai bagian dari misi organisasional PBB juga telah berupaya untuk mencapai resolusi permasalahan. Diantara upaya ini ialah membentuk dialog bersama pemerintah lokal serta mengupayakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam *Cattle Raiding*, baik korban dan pelaku serta mengurangi dampak kehancuran yang telah ditimbulkan melalui *Cattle Raiding* tersebut.⁵

Tidak hanya itu dapat dilihat seperti krisis dan masalah sosial bahwa selain dialog juga dibutuhkan aksi yang sesuai untuk mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Dengan demikian, peran UNMISS dalam menghadapi *Cattle Raiding* di Sudan Selatan menjadi suatu topik dan masalah berkepanjangan yang memiliki posisi yang penting untuk dikaji dan dieksplorasi lebih lanjut.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisa: Kelompok

Layaknya penelitian dalam bidang akademis hubungan internasional pada umumnya, diperlukan adanya implementasi tingkat analisa tertentu sebagai salah satu sarana utama dalam menganalisis persoalan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai level dan unit analisis dari penelitian

⁵ Zawya, UNMISS to look into potential dialogue to end worsening Eastern Equatorial intercommunal violence, <https://www.zawya.com/en/press-release/UNMISS-to-look-into-potential-dialogue-to-end-worsening-eastern-equatorial-intercommunal-violence-g09usx8j>, diakses pada 5 Maret 2022

ini. Menurut Kenneth Waltz, level analisis dalam mengkaji hubungan internasional terbagi tiga, yaitu:

1. Individual;
2. Domestik;
3. Internasional.⁶

Jenis dan golongan dari tingkat analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ditentukan dengan mempertimbangkan aktor utama yang menjadi fokus dalam dibahasnya permasalahan, yaitu PBB yang secara spesifiknya ialah UNMISS sebagai bagian dari organisasi tersebut.

Mempertimbangkan aktor utama adalah UNMISS yang bergerak sebagai organisasi cabang PBB maka penelitian ini akan menggunakan tingkat analisa **Kelompok**. Dalam studi hubungan internasional penggunaan istilah sistem cenderung digunakan dalam beberapa variasi. Dalam penggunaannya tingkat analisis kelompok ini sering juga identik dengan istilah institusi internasional dan aktor politik global.

Perspektif: Konstruktivisme

Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah konstruktivisme. Kehadiran konstruktivisme pada masa berakhirnya perang dingin menjadi salah satu ciri khas utama dari perspektif ini. Konstruktivisme memandang bagaimana dunia dibentuk atas nilai-nilai, yang dimana aktor-aktor yang berpengaruh dalam hubungan internasional secara terus-menerus membentuk dan mengubah tatanan komunitas internasional.

⁶ Waltz, Kenneth, 1959, *Man, the State, and War*, New York: Columbia University Press.

Pandangan yang utama dari aliran ini ialah bahwa politik internasional merupakan hasil dari konstruksi sosial, yang dimana dunia politik dan aktor yang berperan di dalamnya menghasilkan berbagai macam perubahan dalam ruang lingkungan politik tersebut.⁷

Teori Organisasi Internasional

Penggunaan teori Organisasi Internasional, dengan ahli pencetus teori ini ialah Clive Archer. Archer mengemukakan dalam teorinya bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.⁸ Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu cerminan yang nyata yang dapat dilihat dari hubungan PBB yang membentuk UNMISS dengan tujuan untuk menyelesaikan krisis dan meraih kepentingan bersama untuk menjaga kesejahteraan di Sudan Selatan, Namun tetap saja terdapat suatu pembagian dalam organisasi PBB yang membentuk fokus dan konsentrasinya dalam bidang bantuan kemanusiaan, seperti antara lain ialah memberikan bantuan kebutuhan hidup sehari-hari kepada mereka yang tidak berkecukupan.⁹ Archer sendiri membagi 3 cabang utama yang terdapat dalam teori organisasi internasional, yakni:

⁷ Wiener, Antje, 2007. *Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises*. SSRN Electronic Journal. Hal.7.

⁸ Archer, Clive, 2001, *International Organizations*, London:Routledge.

⁹ Barkin, J. Samuel, 2006. *International Organizations: Theories and Institutions*, New York: Palgrave Macmillan, hal. 83-84.

1. Sebagai instrumen.
2. Sebagai arena.
3. Sebagai aktor independen.

Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data untuk meneliti dan memahami persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif seperti tulisan, lisan dari apa yang diamati. Penelitian kualitatif ini akan dilakukan dengan pengumpulan variasi berbagai data yang sifatnya relevan terhadap permasalahan

PEMBAHASAN

Ekonomi Hewan Ternak Di Sudan Selatan

Fakta yang menarik dari keadaan geografis di Sudan Selatan ialah bahwa hewan ternak justru berada dalam jumlah yang lebih banyak dari pada penduduknya. Dari segi ini, dapat dilihat bahwa posisi hewan-hewan tersebut memiliki fungsi yang penting dan sentralistik dalam kehidupan masyarakat Sudan Selatan pada umumnya. Hewan ternak sendiri tidak hanya menyediakan sebuah sumber pangan dan pendapatan bagi penduduk, namun justru juga menjadi sebuah simbol hak istimewa bagi para peternak untuk membangun sebuah jaringan sosial antar pemilik hewan ternak tersebut.

Pada dasarnya, pentingnya keberadaan hewan ternak telah mengalami dinamika perubahan dari tahun ke tahun. Dinamika perubahan ini telah dipengaruhi secara signifikan dengan terjadinya konflik di Sudan Selatan. Mayoritas dari aksi

kekerasan yang terjadipun dipelopori oleh komunitas peternak yang telah memandang posisi hewan ternak sebagai aset perekonomian yang sangat berharga.

Pada saat diratifikasinya perjanjian perdamaian pada tahun 2018, perang sipil yang telah terjadi di Sudan Selatan telah menghasilkan sebanyak 400,000 korban jiwa, perpindahan 4 juta penduduk, dan 2 juta lebih yang menjadi pengungsi di kemah pengungsi yang tersebar di negara-negara seperti Sudan, Mesir, Kenya dan Uganda.

Beberapa studi yang membahas mengenai kondisi sosial peternakan hewan di Sudan Selatan mendeskripsikan bahwa terdapat jumlah rakyat miskin yang lebih dominan, dan secara keseluruhan terdapat adanya ketimpangan dalam jumlah kepemilikan hewan ternak, tanah, dan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. rakyat yang tergolong sebagai bagian yang miskin seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari hewan ternak itu sendiri, sehingga ketimpangan yang terjadi di Sudan Selatan justru semakin mendorong potensi rusaknya kedamaian dan stabilitas masyarakat.

Di Sudan Selatan sendiri, mata pencaharian yang berdasarkan aktivitas pertanian dan peternakan menjadi hal yang dominan, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun budaya yang berupa agro-pastoralisme ini melibatkan aktivitas seperti penggembalaan hewan dan dari hasil panen, sumber penghasilan utama bagi kelompok masyarakat rural ini biasanya ialah hewan-hewan ternak.

Konflik Perang Sipil dan Dampaknya bagi Kondisi Sektor Peternakan di Sudan Selatan

Pecahnya konflik pada tahun 2013 menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam pasar hewan ternak dengan terjadinya *Cattle Raiding* yang merampas hewan-hewan ternak dari rakyat kelas menengah dan kelas atas. Aksi kerusakan yang ditimbulkan lainnya ialah dengan adanya perampasan di jalur ekspor hewan ternak yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, hancurnya perekonomian dan banyaknya pasar yang mengalami kebangkrutan, serta penutupan jalur perdagangan dari wilayah-wilayah sekitar.¹⁰

Kemudian juga ditemukan adanya dampak tidak langsung konflik yang mempengaruhi suplai pasar yang semakin berkurang dikarenakan konflik yang terjadi mempengaruhi aktivitas peternakan, serta masyarakat yang menghindari tersebarnya penyakit yang dapat terjadi pada hewan-hewan tersebut terutama dengan tidak adanya akses fasilitas kesehatan hewan.

Sudan selatan telah mengenal konflik selama lebih dari beberapa dekade. Perang sipil yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah, kemudian perang sipil pada tahun 2013, semakin mengubah realita kehidupan yang dikenal oleh masyarakat di negara Sudan Selatan. Dengan pentingnya kedudukan hewan-hewan ini dari segi ekonomi dan sosial budaya tidak diragukan lagi bahwa hewan ternak ini

memiliki peran yang cukup vital bahkan dalam berlangsungnya konflik itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi mulai dari pendorong sekaligus sebagai unit yang terkena dampak dari konflik yang terjadi. Seringkali, kedua sisi ini menjadi hal yang tidak terpisahkan, dengan satu sisi saling mempengaruhi sisi yang lain. *Cattle Raiding* telah menjadi budaya yang melekat dalam komunitas peternak, contohnya seperti suku Nuer dan Dinka. Namun, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan eskalasi permasalahan krisis hewan ternak yang berputar pada persoalan konflik dan masalah sosial, yaitu diantaranya:

1. Eskalasi konflik dengan adanya senjata, merubah situasi permasalahan *Cattle Raiding* di Sudan Selatan yang dulunya sebatas menggunakan panah dan senjata tradisional menjadi aksi berbahaya yang melibatkan senjata api yang menyebabkan angka kematian yang semakin meningkat secara drastis;
2. Pudarnya batas-batas tradisional dalam aktivitas *Cattle Raiding* dari segi moralitas dan spiritual dalam hal pembunuhan serta wewenang yang dimiliki oleh kepala suku.
3. Pemanfaatan konflik oleh elit militer dengan membentuk kelompok masyarakat sipil bersenjata yang terdiri atas orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas peternak seperti Prajurit Putih

¹⁰ Conciliation Resources, South Sudan: The Conflict in Focus, <https://www.c-r.org/programme/east-and-central-africa/south-sudan-conflict-focus>, diakses pada 15 Desember 2022.

Nuer yang melakukan aksi *Cattle Raiding*.¹¹

Mandat Keamanan dan Bantuan Kemanusiaan UNMISS

Peran UNMISS dalam menangani krisis hewan ternak yang terjadi di Sudan Selatan dapat ditentukan dari berbagai kebijakan yang ditetapkan serta bagaimana UNMISS berperan sebagai instrumen dalam menghadapi masalah humaniter yang terjadi seputar berlangsungnya krisis hewan ternak tersebut. *Cattle Raiding* yang terjadi antar komunitas peternak di berbagai wilayah telah merenggut banyak korban jiwa. Beberapa dekade lalu, pertimbangan bahwa akan terjadi keterlibatan suatu organisasi internasional dan penjaga perdamaian dalam menangani krisis lokal antara kelompok peternak tentunya akan kedengaran sebagai suatu hal yang tidak lazim.

Konflik yang demikian umumnya merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan nilai tradisi masyarakat dan cenderung bersifat sakral, sehingga krisis hewan ternak yang melibatkan perampasan hewan-hewan tersebut menjadi suatu permasalahan yang berada di luar ruang lingkup organisasi seperti UNMISS.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dilakukan dalam kasus ini, yaitu UNMISS sebagai penanganan masalah menunjukkan berbagai laporan, praktek, tantangan serta potensi dalam menangani krisis dan memberikan bantuan kemanusiaan demi tercapainya

penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani permasalahan seperti krisis hewan ternak dan *Cattle Raiding* ini ialah kenyataan bahwa meskipun masalah tersebut terjadi dalam ruang lingkup lokal, dinamika masalah tersebut tersebar secara luas. Hal ini dapat dilihat dari dua segi, yang pertama yaitu dari bagaimana krisis ini memberikan pengaruh yang terjadi tidak hanya di Sudan Selatan namun juga memberikan dampak yang melewati batas-batas kedaulatan negara; yang kedua, cenderung dalam krisis yang terjadi dalam skala yang cukup besar seperti yang dibahas ini terdapat agenda atau kepentingan politik dan ekonomi tertentu dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang berpotensi untuk memanfaatkan konflik tersebut sebagai sebuah eksploitasi.

Meskipun operasi bantuan kemanusiaan seperti UNMISS, yang juga jika dilihat dari *track record* nya yang memiliki berbagai kekurangan dalam berjalannya dimanika keorganisasian di Sudan Selatan bukanlah solusi yang sempurna terhadap penyelesaian masalah di Sudan Selatan, mereka memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung baik secara politik atau teknis untuk membantu pemerintah dan masyarakat Sudan Selatan untuk menghadapi krisis yang sedang berlangsung.

Hal ini tentunya dapat dipertimbangkan dengan adanya kapabilitas dan ketersediaan budget UNMISS, sebagai cabang dari organisasi PBB yang memiliki jumlah pasukan yang besar untuk

¹¹ Young, John, 2016, *Popular Struggles and Elite Co-optation: The Nuer White Army in South Sudan's Civil War*, Switzerland: Small Arms Survey.

membantu menangani konflik dan krisis ini.

Bantuan kemanusiaan dan penjagaan perdamaian di berbagai negara Afrika seperti Sudan Selatan pada umumnya telah dimandatkan dalam upaya untuk mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketegangan antara komunitas seiring terjadinya krisis hewan ternak ini.¹² Di sebagian besar kasus yang serupa, kebijakan ini berupa meminimalisir kekerasan dan membangun kembali apa yang rusak akibat konflik yang telah terjadi.

Menghadapi konflik dan permasalahan yang sedemikian rupa ini pun tidak hanya sangat berhubungan dengan mandat keorganisasian yang diprioritaskan untuk memberikan dan menegakkan bantuan kemanusiaan namun juga dengan bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengimplementasikan mandat yang pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dan menangani krisis yang terjadi.

Tindakan Preventif

Peringatan sebagai upaya preventif mencegah pertikaian yang terjadi merupakan suatu cara yang sangat penting dalam menghindari perseteruan antara komunitas peternak yang bermasalah. Dalam situasi penjagaan perdamaian, hal ini sering sekali dicapai dengan

melakukan interaksi dan konsultasi yang dilakukan secara konsisten dengan komunitas peternak, kelompok etnis, kepala suku, dan aktor yang digolongkan sebagai pihak yang rentan akan situasi krisis yang berlangsung.

Misi bantuan kemanusiaan juga pada umumnya menerapkan apa yang dikenal sebagai Community Alert Networks (CANs), yakni sebuah cara bagi komunitas untuk mengabarkan kepada pihak UNMISS ketika mereka sedang di situasi konflik seperti saat *Cattle Raiding* berlangsung. Salah satu praktik yang juga sering dijumpai di berbagai misi bantuan kemanusiaan termasuk di Sudan Selatan ialah akses dan dukungan terhadap komite perlindungan lokal yang di mana krisis yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dimusyawarahkan dan informasi yang relevan terkait masalah yang dihadapi juga dibagikan kepada UNMISS.

Kesepakatan Marial Bai Dan Migrasi Hewan Ternak Antar Wilayah

Marial Bai adalah sebuah desa di wilayah Bahr el Ghazal di Sudan Selatan. Wilayah ini terletak di antara sungai Magadhik dan sungai Chel yang saling menyatu dan membentuk sungai Lol.¹³ Kesepakatan Marial Bai, yang merupakan perjanjian dengan nama yang diambil dari wilayah tersebut adalah perjanjian yang ditandatangani pada bulan November tahun 2016 oleh peternak dan petani yang berasal dari wilayah Gorgrial, Tonj, dan Wau yang kemudian diulas kembali pada bulan oktober 2017

¹² UN Security council report, UN Mission in South Sudan (UNMISS): Vote on Mandate Renewal Resolution, https://www.securitycouncilreport.org/whats_inblue/2022/03/un-mission-in-south-sudan-unmiss-vote-on-mandate-renewal-resolution.php, diakses pada 10 Januari 2023

¹³ Bookatrip, Marial Bai, <https://www.gobookatrip.com/destiny/marial-bai/>, diakses pada 20 Januari 2023.

dalam rangka meregulasi migrasi musiman hewan ternak.

UNMISS dengan kolaborasi dengan pemerintah lokal dan bantuan dari organisasi seperti Food and Agriculture Organization (FAO) memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan persetujuan yang ditetapkan dengan mengadakan berbagai rapat, konferensi, dan sebagainya dengan menyinggung permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik suatu komunitas. Diantaranya seperti pada tahun 2017, ketika UNMISS memberikan fasilitasi suatu konferensi, yang di mana sekitar 300 peternak dari beberapa suku yang berbeda untuk menyepakati kesepakatan Marial Bai. Perjanjian ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk meregulasi hubungan antara peternak di wilayah Wau.

Perjanjian ini menyatakan bahwa tidak ada izin bagi pihak peternak untuk membawa persenjataan selama proses migrasi pada musim panas ke Wau. Siapa pun yang ditemukan melakukan hal tersebut akan ditegur secara tegas oleh pihak pemerintah yang berwenang. Tidak hanya itu tidak diperbolehkan juga bagi siapapun untuk membawa hewan-hewan ternaknya untuk memasuki wilayah Wau tanpa adanya surat izin dari kepala suku mereka, yang di mana jika aturan ini tidak dipatuhi maka pihak yang bersangkutan tidak akan diberikan izin untuk memasuki wilayah Wau.¹⁴

¹⁴ UNMISS, Marial Bai Agreement to Regulate Relations between Farmers and Pastoralists in Wau Area, <https://unmiss.unmissions.org/marial-bai-agreement-regulate-relations-between->

Kemudian UNMISS dan perwakilan dari wilayah Wau, Tonj, dan Gogrial mengadakan review terhadap perjanjian yang bersangkutan. Adapun tujuan dari dilakukannya konferensi yang terjadi secara periodik ini ialah untuk mempromosikan perdamaian dan lingkungan perpolitikan, sosial, dan ekonomi yang stabil pada masa periode migrasi hewan ternak.¹⁵ Diantara beberapa pembahasan, Marial Bai akhirnya mengeluarkan sejumlah resolusi dengan poin-poin aturan yang harus dipatuhi oleh pihak peternak yang terlibat. Setiap pihak dari tiga wilayah tersebut telah menyetujui dan mengakui sumber daya flora dan fauna merupakan sumber daya nasional dari Sudan Selatan dan harus dijaga dan dilestarikan seluruhnya. Selain itu ada juga resolusi yang membahas poin aturan seperti:

1. Semua pergerakan hewan ternak di area panen wilayah Wau ditetapkan pada bulan januari setiap tahunnya dan kembali lagi dari area Gogrial dan Tonj atau lokasi panen lainnya, dikarenakan musim hujan dimulai pada bulan April atau Mei.
2. Jika misalnya rumput dan air tidak tersedia sebelum Januari, kepala suku yang bersangkutan di Gogrial atau Tonj akan bernegosiasi terkait migrasi yang dilakukan lebih awal dengan kepala suku dari wilayah

[farmers-and-pastoralists-wau-area](#), diakses pada 23 Januari 2023.

¹⁵ Peaceagreements, 1st Review of Marial Bai Agreement on Cattle Seasonal Movement, <https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2379>, hal. 2

Wau akan mengikuti prosedur pergerakan migrasi hewan ternak tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian perjanjian ini juga mengatur mengenai syarat administrasi berupa surat dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin melakukan migrasi hewan ternak tersebut. Setiap peternak yang berencana untuk bergerak bersama hewan ternaknya ke wilayah Wau harus mendapatkan surat izin dari kepala suku dari wilayah asal peternak tersebut, dengan surat tersebut mengandung beberapa informasi seperti nama peternak, nama kepala suku wilayah asal, dan wilayah yang dituju.¹⁶

Aturan yang ditetapkan menyatakan bahwa hewan ternak yang dimiliki oleh warga di wilayah Wau seluruhnya akan mengikuti aturan pergerakan musiman ternak yang telah ditetapkan. Selain itu kerusakan wilayah panen oleh hewan ternak seperti sapi ataupun kerbau dan bahkan tenaga militer harus dilaporkan langsung kepada kepala suku setempat atau komandan yang akan menindaklanjuti kerusakan yang bersangkutan.

Kemudian kesepakatan ini juga membahas mengenai prosedur penjagaan hewan, dengan penekanan bahwa para pemilik hewan ternak dan kepala suku harus memastikan hewan-hewan tersebut dijaga oleh pria dewasa. Selain itu, kegagalan dalam mengendalikan hewan ternak serta kerusakan yang terjadi terhadap panen harus dikompensasi.

Adapun larangan juga diberikan terhadap tindakan membunuh hewan-hewan ternak di

area yang bersangkutan, yang diatur pada resolusi nomor 7.¹⁷ Ketika seekor sapi atau kerbau dijumpai berkeliaran dan mengakibatkan rusaknya lahan panen, maka komunitas di wilayah tersebut harus menangkap hewan itu dan menyerahkannya ke pihak otoritas seperti kepala suku atau polisi yang bertugas untuk menjaga hewan tersebut, yang kemudian pemiliknya diwajibkan untuk melapor dan membayar kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternaknya.

Jika misalnya hewan tersebut dibunuh oleh seseorang yang dikenal dalam komunitas tersebut, maka dia akan diwajibkan untuk memberikan ganti. Jika seekor sapi dibunuh oleh orang yang tidak dikenal di dekat wilayah komunitas maka komunitas tersebut akan bertanggung jawab untuk memberi kompensasi atas sapi yang dibunuh. Sebaliknya, jika suatu area panen dirusak oleh hewan ternak yang tidak dikenal pemiliknya maka seluruh peternak imigran yang berada di wilayah sekitar area tersebut akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah dihasilkan.

Layaknya *Cattle Raiding*, imigrasi musiman hewan ternak merupakan praktek yang telah lama berada dalam sejarah masyarakat Sudan Selatan dan seiring berjalannya waktu kesepakatan terkadang dibuat namun tidak secara tertulis. Masyarakat pun menghormati perjanjian tradisional ini sebagai bagian dari budaya mereka dan kesepakatan yang dicapai akhirnya tumbuh menjadi hukum adat tradisional. Dengan

¹⁶ Ibid. Hal. 2-3

¹⁷ Ibid, hal. 5

alasan ini, implementasi dari kesepakatan yang ditulis harus berorientasi dengan kalangan masyarakat untuk memungkinkan kesepakatan tersebut agar diterima oleh komunitas dan melaksanakan resolusi kesepakatan tersebut.

Dengan pertimbangan ini, dibentuknya komite perwakilan wilayah bersama UNMISS ialah untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kesepakatan Marial Bai. Adapun dibentuk sebuah struktur organisasi yang mengatur kesepakatan migrasi hewan ternak tersebut, dengan masing-masing perwakilan dari wilayah Wau, Tonj, dan Gogrial yang berjumlah 4 orang setiap wilayahnya. Mereka bersama UNMISS memiliki tugas untuk merencanakan dan menyediakan bantuan untuk mengendalikan implementasi perjanjian Marial Bai dan memastikan partisipasi masyarakat yang terlibat ditegakkan.

Kesepakatan ini diciptakan untuk menghindari konflik yang sering timbul antara kelompok peternak akibat imigrasi tanpa adanya regulasi yang tetap. Hal ini pun menyebabkan perampasan hewan ternak semakin marak terjadi dengan alasan perampasan tersebut sebagai balas dendam mereka yang merasa sebagai korban. Para petani misalnya yang berasal dari lokasi tujuan imigran terkadang rusak panennya sehingga mereka merebut hewan dari peternak yang datang dari wilayah lain.

Maka oleh karena itu kesepakatan ini juga mengatur mengenai aturan perseteruan yang di mana dibentuk juga komite resolusi

konflik. Adapun tugas yang diberikan kepada mereka yaitu:

1. Menjamin dukungan sosial yang signifikan dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan konflik yang timbul;
2. Menjamin berjalannya keadilan sosial untuk mencegah masalah yang di mana pihak kepala suku atau peternak tidak dapat mencapai suatu kesepakatan;
3. Mencari solusi yang memuaskan segala pihak yang bertikai sehingga menghindari eskalasi masalah dan menghindari perampasan hewan ternak dan konflik seputar hewan-hewan tersebut.

Terlebih lagi, UNMISS mendukung koordinasi antar wilayah komunitas dalam bentuk kampanye untuk meningkatkan implementasi perjanjian Marial Bai pada tahun 2018. Pada tahun 2019, dengan terjadinya konferensi damai antara wilayah Wau, Tonj, dan Gogrial ditandatangani dan diratifikasi kesepakatan untuk mengakhiri konflik antar komunitas peternak di wilayah-wilayah tersebut.

Didorong oleh sumber daya dan kekurangan hewan ternak yang dirampas, migrasi hewan ternak dari wilayah Warrap dan Lakes ke wilayah Wau menjadi titik rawan terjadinya kekerasan antara Luo dan Dinka dari masing-masing wilayah asal mereka. Keseringan kekerasan yang berhubungan dengan perampasan dan kepemilikan hewan ternak di Sudan Selatan serta diperparah dengan sumber daya seperti air dan lahan beternak menjadi beberapa akar masalah yang

mengakibatkan peningkatan kekerasan dan krisis ini terjadi pada tahun 2019.

Program ini sendiri mendukung kesepakatan Marial Bai. Rencana ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari kejahatan yang berhubungan dengan hewan ternak, meningkatkan kesetaraan gender menghubungkan kesejahteraan dengan proses perdamaian, dengan merekonsiliasi komunitas-komunitas peternak untuk perdamaian yang berkeberlangsungan.¹⁸

Dengan demikian, UNMISS memberikan peran yang cukup besar dalam menangani krisis hewan ternak. Hewan-hewan yang memiliki status yang sangat signifikan tidak hanya sebatas simbol bagi masyarakat Sudan Selatan, menjadi sebuah pertimbangan bahwa wajar jika persoalan yang terjadi seputar hewan-hewan ini merupakan masalah yang sangat sensitif. Dari awal terbentuknya hingga sekarang, UNMISS masih aktif dalam berkontribusi untuk mengatasi krisis hewan ternak yang terjadi.

Saat ini, situasi hewan ternak sudah jauh lebih maju dibanding beberapa tahun lalu saat tidak ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini dan juga dengan diperparahnya perang sipil yang melanda Sudan Selatan. Namun juga dibalik semua kebijakan yang diterapkan aksi kekerasan terkait hewan ternak ini masih terjadi setiap tahunnya hingga

sekarang. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa Sudan Selatan dengan bantuan dari UNMISS memiliki harapan untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan dan perampasan hewan-hewan ternak ini dan hidup dalam situasi masyarakat yang lebih sejahtera untuk ke depannya.

KESIMPULAN

Ketika suatu kebiasaan menjadi hal yang telah umum dalam lingkungan masyarakat, maka besar kemungkinan lama-kelamaan kebiasaan tersebut akan berubah menjadi sebuah tradisi budaya. Namun budaya yang telah mewarnai kehidupan masyarakat sejak lama kemudian diintervensi oleh adanya konflik dari suatu pihak dalam masyarakat yang sama maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu hal yang membahayakan kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang terjadi di Sudan Selatan, yang di mana pemeliharaan hewan ternak, yang dari dulu hingga sekarang dipandang sebagai suatu subjek yang sangat simbolis dan sangat tinggi perannya di saat bersamaan menjadi hal yang sangat diincar dalam krisis hewan ternak yang terjadi di negara tersebut.

Hewan ternak di Sudan Selatan memiliki fungsi yang sangat besar, ada dari segi ekonomi misalnya hewan-hewan seperti sapi dapat menghasilkan produk susu untuk kemudian dijual ke pasar-pasar. Adapun fungsi lainnya yang menarik ialah bagaimana hewan-hewan ini menjadi fondasi atas terbentuknya jaringan sosial di masyarakat, dengan kelompok peternak yang saling membentuk interaksi dan jaringan sosial ketika mereka saling

¹⁸ UN Multi-partner Trust Fund, Mitigating Cattle-Related Violence in the State Border Areas of Tonj, Gogrial, and Wau, <https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/40000/35883>, diakses pada 28 Januari 2023

berinteraksi. Namun di balik terjadinya krisis yang berlangsung salah satu penyebab utama dari krisis ini sendiri ialah budaya yang dari dulu telah ada pada masyarakat, yakni *Cattle Raiding*. Budaya yang awalnya merupakan suatu praktek yang tidak memakan korban dan disetujui oleh kepala suku, kini menjadi bencana yang memakan korban jiwa para kelompok etnis peternak Sudan Selatan.

Meskipun demikian, situasi ini pada hakikatnya didorong oleh terjadinya konflik yang besar yakni perang sipil antara pihak oposisi dengan pemerintah Sudan Selatan yang terjadi pada tahun 2013. Yang paling membahayakan situasi hewan ternak dan masyarakat di sini ialah dengan masuknya intervensi senjata dari negara seperti Cina, menyebabkan terjadinya eskalasi yang sangat besar terhadap bahaya yang dialami. Terlebih lagi dengan kondisi konflik yang terjadi, hewan ternak semakin menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dengan kerusakan yang ditimbulkan mayoritas kemah-kemah peternak ini tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dan peternakan mereka.

Alhasil, hal ini menjadikan situasi memaksa mereka untuk merampas secara paksa apa yang dimiliki oleh komunitas lainnya. Hingga kini, konflik yang berkaitan dengan hewan ternak masih dapat ditemukan di beberapa wilayah tertentu yang di mana pelakunya sendiri ialah suku-suku etnis yang merupakan sama-sama peternak. Oleh karena itu, situasi yang demikian mengharuskan PBB untuk membentuk misi bantuan kemanusiaan yang bertugas untuk

menyelesaikan permasalahan, yang di mana organisasi ini dikenal dengan nama United Nations Mission in South Sudan (UNMISS).

Organisasi ini dibentuk pada tahun 2011, dan hingga sekarang telah mendapatkan peran sebagai organisasi yang aktif dalam mengikuti segala seluk-beluk peta politik di Sudan Selatan. Pada masa terjadinya perang sipil beberapa tahun silam, organisasi ini juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan menyediakan kemah-kemah untuk pengungsian dan mengirim tentara pengamanan.

Adapun dalam upaya untuk menangani krisis hewan ternak ini, UNMISS mengeluarkan beberapa kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan secara periodik dan berkolaborasi dengan pihak pemerintah lokal. Adapun peran yang dilakukan oleh UNMISS dalam menangani krisis hewan ternak ialah:

1. Melakukan pengamanan hewan dan peternak berdasarkan mandat keamanan keorganisasian.
2. Melaksanakan konferensi dan dialog perdamaian, dengan setiap dialog merupakan diskusi secara musyawarah antara pihak UNMISS dengan perwakilan kelompok etnis dan pemerintah lokal yang membahas mengenai resolusi konflik hewan ternak.
3. Kebijakan preventif, dengan upaya untuk mencegah potensi pecahnya masalah dengan membentuk komite pengawasan *Cattle Raiding*.

Hal ini memberikan fasilitasi bagi peternak untuk menjaga dan meminta perlindungan kepada UNMISS jika terjadi sebuah bahaya.

4. Kesepakatan Marial Bai, yang merupakan perjanjian antara UNMISS dengan peternak dari Tonj, Gogrial, dan Wau merupakan sebuah perjanjian yang mengatur mengenai regulasi migrasi hewan ternak dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Kebijakan UNMISS, beserta implementasinya dapat dilihat mencerminkan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Cliver Archer, yakni sebagai instrumen dan arena. UNMISS sebagai instrumen dapat dilihat dari kebijakan mandat keamanan yang merupakan sarana PBB untuk mencapai tujuan keamanan di Sudan Selatan. peran UNMISS sebagai arena dapat dilihat dari kebijakan yang berkaitan dengan peran UNMISS dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam krisis hewan ternak Sudan Selatan sehingga masalah tersebut dapat direkonsiliasikan dan mencegah potensi konflik selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- UNMISS, Facts and Figures, <https://unmiss.unmissions.org/facts-and-figures>, diakses pada 27 September 2022.
- Britannica, South Sudan|Facts, Map, People, and History, <https://www.britannica.com/place/South-Sudan>, diakses pada 3 Maret 2022.
- Calley, Andy, 2018. Livestock and Livelihoods in South Sudan, K4D: Knowledge, Evidence

and Learning for Development, hal. 3

United Nations, United Nations Mission in South Sudan, <https://unmiss.unmissions.org/>, diakses pada 5 Maret 2022.

Zawya, UNMISS to look into potential dialogue to end worsening Eastern Equatorial intercommunal violence, <https://www.zawya.com/en/press-release/UNMISS-to-look-into-potential-dialogue-to-end-worsening-eastern-equatorial-intercommunal-violence-g09usx8j>, diakses pada 5 Maret 2022

Waltz, Kenneth, 1959, *Man, the State, and War*, New York: Columbia University Press.

Wiener, Antje, 2007. Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises. SSRN Electronic Journal. Hal.7.

Archer, Clive, 2001, *International Organizations*, London: Routledge.

Barkin, J. Samuel, 2006. *International Organizations: Theories and Institutions*, New York: Palgrave Macmillan, hal. 83-84.

Conciliation Resources, South Sudan: The Conflict in Focus, <https://www.conciliationresources.org/programme/east-and-central-africa/south-sudan-conflict-focus>, diakses pada 15 Desember 2022.

Young, John, 2016, *Popular Struggles and Elite Co-optation: The Nuer White Army in South Sudan's Civil War*, Switzerland: Small Arms Survey.

UN Security Council report, UN Mission in South Sudan

- (UNMISS): Vote on Mandate Renewal Resolution, <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/03/un-mission-in-south-sudan-unmiss-vote-on-mandate-renewal-resolution.php>, diakses pada 10 Januari 2023
- Bookatrip, Marial Bai, <https://www.gobookatrip.com/destiny/marial-bai/>, diakses pada 20 Januari 2023.
- UNMISS, Marial Bai Agreement to Regulate Relations between Farmers and Pastoralists in Wau Area, <https://unmiss.unmissions.org/marial-bai-agreement-regulate-relations-between-farmers-and-pastoralists-wau-area>, diakses pada 23 Januari 2023.
- Peaceagreements, 1st Review of Marial Bai Agreement on Cattle Seasonal Movement, <https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2379>, hal. 2
- UN Multi-partner Trust Fund, Mitigating Cattle-Related Violence in the State Border Areas of Tonj, Gogrial, and Wau, <https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/40000/35883>, diakses pada 28 Januari 2023
- Peace Tech Lab, Monitoring and Early Warning Report on Violence in South Sudan, <https://www.peacetechlab.org/south-sudan-report-6>, diakses pada 28 Januari 2023.